KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Empati Kepada Pekerja Rumah Tangga
Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 9

Menjelang masa jabatan DPR RI periode 2019-2024 berakhir, RUU PPRT diharapkan dapat dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui.

Empati kepada Pekerja Rumah Tangga

Ihfa Firdausya
ihfa@mediaindonesia.com

DESAKAN berbagai pihak agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) disahkan masih belum menuai hasil. Hingga saat ini, belum ada titik terang soal kapan RUU tersebut akan disahkan.

Menjelang berakhirnya masa jabatan DPR RI periode 2019-2024, RUU PPRT diharapkan dapat dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pengesahan RUU PPRT disebut mendesak sebagai wujud empati terhadap para pekerja rumah tangga (PRT).

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan esensi dari RUU PPRT ialah mengenai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Bila RUU PPRT dapat disahkan menjadi undang-undang, imbuh Lestari, berarti bangsa ini betul-betul bisa memberikan pengakuan bahwa setiap kerja manusia itu berharga.

"Ujungnya ialah betul-betul *political will* para pimpinan. Pada sisa waktu yang tinggal 1,5 bulan karena pada 1 Oktober anggota DPR RI baru akan dilantik, kita bisa melakukan kerja-kerja politik untuk memastikan bahwa RUU ini segera dapat dibawa ke paripurna," papar Reric, sapaan akrab Lestari, dalam webinar Forum Diskusi Denpasar 12, kemarin.

Sesuai dengan mekanisme, jelas Reric, untuk bisa masuk rapat paripurna, RUU harus diputuskan di rapat pimpinan. "Dari sekarang sampai sebelum sidang paripurna terakhir masa jabatan, itu (DPR) harus 'digeruduk', mengingatkan para pimpinan DPR untuk mengambil keputusan," tandasnya.

Dia berharap komitmen DPR RI terhadap penyelesaian RUU, termasuk RUU PPRT, tetap tinggi sehingga para PRT dapat segera memiliki instrumen perlindungan yang menyeluruh saat mencari nafkah.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya menyebut bukan hanya dibutuhkan *political will*, tetapi juga *strong political will*. Dikatakan Willy, pemerintah sudah mengirimkan surat presiden (surpres) dan daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada DPR.

"Yang kita butuhkan ialah *strong political will* dari pimpinan DPR," kata Willy.

Ia berharap pengesahan RUU PPRT ini menjadi warisan yang penting dari DPR periode 2019-2024. Ketika RUU ini disetujui di rapat paripurna untuk dibahas di tingkat selanjutnya, Willy menjamin *beleid* ini akan rampung dalam waktu seminggu.

"Saya ketua panja. Secara tradisi yang akan membahas ini dikembalikan ke pengusul. Pengusulnya kan Badan Legislasi (Baleg). Nanti akan dibentuk panja di Baleg. Saya janji seminggu kelar," tegasnya.

Sulit ditembus

Aktivis dari Institut Sarinah, Eva Kusuma Sundari, yang turut memperjuangkan RUU tersebut mengaku sulit menembus ring-ring yang ada untuk melobi pimpinan DPR demi melancarkan pengesahan RUU PPRT.

"Ketua KSP tulis surat, Menkumham tulis surat, *nggak* ada respons. Apalagi Komnas Perempuan. Setiap hari ada PRT yang aksi di gerbang (DPR) sudah 1,5 tahun ini," kata Eva.

Eva menuturkan, para pemangku kepentingan ini harus berempati pada perjuangan para PRT yang terus-menerus mengalami kekerasan. Hanya karena tidak ada perlindungan dari negara, katanya, kekerasan ini berkelanjutan hingga pada bentuk perbudakan modern. Ia pun mempertanyakan fraksi yang menolak karena secara politik tidak menimbulkan konflik dan secara ekonomi tidak ada yang dirugikan.

"Tidak ada UMR, libur juga tidak mengikuti industri, pemidanaan hanya agennya, dan semua urusan hak normatif diatur melalui musyawarah dengan majikan," kata Eva.

Ia menduga ada superioritas yang terganggu ketika PRT ini menjadi sama-sama berkesetaraan di depan hukum. "Yang kita inginkan mereka terlindungi, negara harus mengurusi," pungkasnya. (Ifa/Z-9)